

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Bab terakhir dari penelitian ini berisi penutupan yang mencakup rangkuman hasil yang telah dicapai serta rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut terkait fenomena *cancel culture* di ranah digital. Bagian ini memberikan arahan untuk eksplorasi yang lebih mendalam mengenai dampak serta mekanisme *cancel culture* dalam dunia digital.

#### **5.1. Kesimpulan**

*Cancel culture* di Twitter/X beroperasi sebagai mekanisme kontrol sosial digital yang efektif, memungkinkan masyarakat maya secara kolektif mengidentifikasi, mengeksplosi, dan mengkritisi perilaku yang dianggap menyimpang dari norma, seperti yang terjadi dalam kasus plagiarisme Ricodwichey. Melalui dinamika interaksi ini, pengguna platform berperan strategis dalam membentuk konsensus etika di ruang digital. Dalam perspektif intersubjektivitas Alfred Schutz, interaksi antar pengguna media sosial tidak sekadar menciptakan ruang dialog, melainkan menghasilkan konstruksi makna bersama yang mendorong akuntabilitas sosial secara kolektif. Proses komunikasi dan berbagi bukti dalam kasus tersebut mendemonstrasikan mekanisme pembentukan kesepakatan yang menegaskan pentingnya originalitas karya. Dengan demikian, *cancel culture* berevolusi menjadi instrumen pengawasan sosial yang direpresentasikan oleh komunitas digital untuk memelihara integritas dan norma di platform media sosial.

#### **5.2. Saran**

Adapun saran yang diharapkan dapat menjadi manfaat dari hasil penelitian, yaitu:

1. Bagi Masyarakat, diharapkan masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial dapat lebih berhati-hati dalam berpartisipasi dalam fenomena *cancel culture*. Sebelum menyebarkan informasi atau berpartisipasi dalam tindakan pemboikotan, penting bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi fakta secara mendalam dan tidak sekadar mengikuti arus opini publik. Tindakan ini tidak hanya melindungi orang lain dari potensi fitnah, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya diskusi yang lebih sehat di media sosial. Selain itu, masyarakat perlu membangun kesadaran untuk menggunakan platform digital secara etis, dengan tetap

menghormati hak-hak individu dan menjaga sikap empati.

2. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi akademisi yang tertarik untuk menggali lebih dalam fenomena *cancel culture* dalam konteks media sosial dan budaya digital di Indonesia. Akademisi disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai dampak psikologis jangka panjang terhadap individu yang menjadi sasaran *cancel culture*, serta bagaimana fenomena ini dapat memengaruhi dinamika sosial dalam komunitas online. Dengan memadukan pendekatan fenomenologi dan analisis data digital, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menawarkan wawasan yang lebih komprehensif tentang interaksi sosial di era digital.
3. Bagi Pemerintah, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif dalam merespons dinamika komunikasi di ruang digital, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan *cancel culture* sebagai alat intimidasi atau perundungan. Penting bagi pemerintah untuk mendorong kolaborasi dengan platform media sosial guna memastikan perlindungan bagi pengguna sekaligus mempromosikan penggunaan ruang digital yang sehat. Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan program literasi digital yang lebih terarah, dengan fokus pada etika digital, kritis dalam menerima informasi, serta cara berpartisipasi secara konstruktif di media sosial, sehingga masyarakat dapat menjadi pengguna yang lebih cerdas dan bertanggung jawab.